

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA  
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**Nama : Eka Oktarina**

**NIM : 222014011**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA  
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Eka Oktarina**

**NIM : 222014011**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Rendahnya  
Penyerapan Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan  
kota Palembang  
Nama : Eka Oktarina  
NIM : 222014011  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Pembimbing I,

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal

Pembimbing II,



**Drs. Sunardi, S.E., M.Si**  
NIDN/NBM: 0206046303/784021



**Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIDN/NBM: 020647101/859196

Mengetahui,  
Dekan  
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Oktarina

NIM : 222014011

Jurusan : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan tidak  
Terealisasinya Anggaran Belanja pada Dinas  
Perhubungan Kota Palembang.

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada yang merupakan menjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari telah terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2019

Penulis

  
Eka Oktarina

## ABSTRAK

**Eka Oktarina/222014011/Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kota Palembang/Akuntansi Sektor Publik.**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu: rumusan masalah adalah Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan rendahnya penyerapan Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kota Palembang? Tujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan variabel Faktor Internal dan Faktor Eksternal dan penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Data primer berupa data hasil wawancara dan Data Sekunder berupa arsip dokumen yang ada di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program terealisasinya anggaran belanja pada Dinas Perhubungan Kota Palembang sering memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan pengesahannya sehingga anggaran tidak terealisasi sepenuhnya. Termasuk juga pada saat pelaksanaan proses realisasi anggaran yang sering mengalami tidak tepat sasaran dan tidak realistis karena perencanaan yang sering mendapatkan revisi secara berulang-ulang dalam satu periode anggaran.


**Kata kunci:** Anggaran Belanja, lemahnya perencanaan, proses pembahasan, proses tender, dan ketakutan.

*Abstract*

*Eka Oktarina / 222014011 / 2019 / The Factors Analysis that Cause the Low Expenditure Budget in the Transportation Department of Palembang City / Public Sector Accounting.*

*This research was conducted to answer the existing problems, namely: the formulation of the problem was to know what were the factors analysis that cause the low expenditure budget in the transportation department of Palembang city? The aim was to find the factors analysis that caused the low expenditure budget in the transportation department of Palembang city. This research used Internal Factors and External Factors and this research included descriptive research. Primary data used interviews and Secondary Data in the form of documents archives that existed in the transportation department of Palembang city. Data collection techniques used interview and documentation. The analysis technique used qualitative analysis. The results of the study which showed that the implementation of the budget realization program in the transportation department of Palembang city often took a long time and caused delays in its approval so that the budget was not fully realized. This also included the implementation of the budget realization process which often experienced inaccuracies and was not realistic because planning often got repeated revisions within a budget period.*

*Keywords: Expenditure Budget, Weak Planning, Discussion Process, Tender Process, and Fear.*

PENGESAHAN  
NO. 398 /Abstract/LB/UMP/IX /2019  
Telah di Koreksi oleh  
Lembaga Bahasa  
Universitas Muhammadiyah Palembang 

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang motivator, junjungan umat islam yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metodologi penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab kesimpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orangtua ku tercinta, yaitu Ayahku Mulyadi dan Ibuku Pitriyani yang telah meridhoi, menyemangati, mendoakan dan memberikan dorongan baik materil maupun spirit yang tiada henti. Adikku Dewi Mutiah dan Muhammad Abdil, juga seluruh keluarga besarku disertai teman seperjuangan

yang dipertemukan karena Allah, yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan agar menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pembimbingku Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si dan Bapak Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA. Selalu sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian agar menjadi lebih baik lagi. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staff karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si. Selaku ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si. Selaku Pembimbing Akademik paket 11 Angkatan 2014.
5. Bapak dan Ibu Dosen staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.



6. Kepala Dinas, bagian keuangan, perencanaan beserta seluruh staff Dinas Perhubungan Kota Palembang yang dengan tulus mengarahkan dan membantu.
7. Sahabat-sahabatku yang telah membantu serta Semua Teman-Teman seperjuangan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, meskipun demikian semoga dari tulisan ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Aamiin.

Palembang, Agustus 2019

Penulis

Eka Oktarina

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	13

1. Konsep APBD .....	13
a. Pengertian APBD .....	13
b. Struktur APBD .....	15
c. Komponen APBD .....	16
d. Fungsi APBD .....	25
e. Penyusunan APBD.....	28
2. Faktor-faktor Rendahnya Penyerapan APBD .....	28
3. Prosedur Penyusunan Anggaran.....	35
4. Dokumen dalam pelaksanaan Belanja.....	36
5. Siklus Anggaran .....	37
6. Proses Lelang/Tender.....	38
7. Anggaran Belanja.....	38
a. Pengertian Anggaran Belanja .....	38
b. Belanja tidak langsung dan belanja langsung.....	39
c. Pengukuran Belanja.....	42
d. Pelaksanaan Belanja .....	43
B. Penelitian Sebelumnya .....	43

### **BAB III   METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Operasionalisasi Variabel.....	48
D. Data yang Diperlukan .....	49
E. Metode Pengumpulan Data .....	50

F. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Palembang.....	53
2. Struktur Organisasi .....	57
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	64
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Laporan Penyerapan Anggaran Belanja.....	10
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya .....	46
Tabel III.1 Variabel, Definisi, Indikator .....	49
Tabel IV.1 Laporan Penyerapan Anggaran Belanja .....	75
Tabel IV.2 Laporan Penyerapan Program Kerja/kegiatan.....	76

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Siklus Anggaran .....	37
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang ..	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Selesai Riset dari Tempat Penelitian

Lampiran 3 Plagiarism Checker

Lampiran 2 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 Sertifikat Hafalan Surat-Surat Pendek

Lampiran 4 Sertifikat Komputer

Lampiran 5 Sertifikat TOEFL

Lampiran 6 Biodata Penulis

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Akuntansi Sektor Publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia dan departemen-departemen bawahannya dengan tujuan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada masyarakat. Provinsi, Kabupaten/kota, desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai ke bawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Lembaga pemerintah merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktifitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, pemerintah mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan, tetapi semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan.

Umumnya setiap lembaga berupaya seoptimal mungkin mencapai tujuan yang telah mereka rencanakan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam kegiatan lembaga, semua bagian seperti pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan akan menjadi satu kesatuan kerja yang harus saling mendukung dalam proses pencapaian



tujuannya, maka setiap lembaga senantiasa berusaha untuk menyusun strategi-strategi sebagai petunjuk dalam mencapai target yang hendak dicapai. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah (Haw, 2014: 150). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang selama periode tertentu (satu tahun). Anggaran ini digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Windhu, 2018: 1).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki pedoman yang sudah ditetapkan pemerintah daerah yang tujuannya sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan (Peraturan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU RI No.32 Tahun 2016).

Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Realisasi Anggaran yang maksimal harus juga diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik, realisasi anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Secara umum realisasi anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu (Abdul, 2014: 104). Beberapa faktor yang menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja dapat diketahui setelah dilakukan analisis.

Menurut Abdul (2017: 98), berikut faktor-faktor yang terkait, antara lain: Lemahnya Perencanaan Anggaran, rendahnya realisasi anggaran

mencerminkan pelaksanaan program pemerintah yang lemah dan kurang matang. Adanya revisi-revisi menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi. Jika perencanaan dilakukan dengan matang seharusnya tidak perlu adanya revisi-revisi serta telah ada jadwal kegiatan yang pasti sehingga tidak menumpuk diakhir tahun anggaran. Lamanya Proses Pembahasan Anggaran, dalam menyusun anggaran tidak semata-mata hanya dilakukan oleh satuan kerja yang ada, tapi juga merupakan tugas dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang merupakan wakil rakyat untuk menuangkan aspirasinya kepada pemerintah. DPR sebagai dewan perwakilan rakyat mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak anggaran yang sudah direncanakan oleh masing-masing bidang-bidang dan seksi-seksi dalam proses pengesahan anggaran di DPRD. Namun, proses pengesahan anggaran tersebut sering tidak tepat waktu dan mengakibatkan anggaran lambat untuk terealisasi.

Lambatnya Proses Tender, proses tender merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan yang dilakukan ULP (Unit Layanan Pengadaan). Beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa perlu disosialisasikan lebih luas. Tidak sedikit pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran yang masih kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran. Penyebab lainnya adalah masalah penstandaran biaya. Biaya dilapangan tidak sesuai dengan standar biaya umum dan standar biaya khusus, sehingga menyebabkan terbatasnya peserta lelang, pelelangan ulang, serta sanggahan dalam proses lelang. Ketakutan menggunakan anggaran, yaitu adanya kehati-

hatian dari pejabat perbendaharaan dalam melaksanakan pengadaan mengingat maraknya kasus tipikor yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ketakutan ini muncul karena banyaknya pejabat atau pelaksana anggaran diseret kemeja hijau karena terlibat tindak pidana korupsi. Dipengaruhi oleh rasa takut itu banyak yang enggan merealisasikan program kegiatan yang telah dianggarkan.

Beberapa fenomena terkait Realisasi Anggaran Belanja yang dikemukakan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan mencatat sampai dengan akhir agustus 2018, realisasi belanja dari 568 Satuan Kerja di Sumsel baru mencapai 48,27 persen. Menurutnya selama pelaksanaan anggaran proses pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi kendala hingga menghabiskan waktu yang cukup lama, sehingga berdampak pada lambatnya realisasi anggaran, sebenarnya proses pengadaan barang dan jasa sudah dapat dilakukan pada November-Desember di tahun sebelumnya. Namun, seringkali terjadi perubahan, perbaikan, dan sebagainya yang membuat tanda tangan kontrak kegiatan tak bisa dilakukan di awal tahun. Faktor-faktor seperti itulah yang kerap kali membuat lambatnya realisasi belanja (TribunSumsel.com).

Agus Supriyanto mengatakan bahwa “Realisasi Belanja merupakan realisasi terendah dalam tiga tahun terakhir,” ia menilai adanya pengalihan pengadaan barang dan jasa melalui Badan Pelayanan Barang dan Jasa, menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya realisasi anggaran. Sebab hal itu dinilai belum optimal karena masih kurangnya sarana dan prasarana

pendukung. Ia menyebut Sumber Daya Manusia juga masih belum berkompeten dan optimal kualitas dan kuantitas dalam melayani proses layanan pengadaan barang dan jasa. Agus juga mengungkapkan, penyebab lain dari rendahnya realisasi anggaran karena sejumlah dokumen administrasi belum tuntas, misalnya beberapa rencana pengadaan barang/jasa belum dapat dituntaskan karena administrasi belum tuntas ([www.dishub.palembang](http://www.dishub.palembang)).

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumsel 2018, hingga Oktober baru mencapai 63,48%. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Mukhlis, saat ditemui diruangan kerjanya, “karena kami membuat laporan realisasi satu minggu sekali, sudah berapa besar realisasi APBD, seperti pekan kemarin, saya mengambil akhir pada hari jumat”. Mukhlis mengungkapkan, Organisasi Perangkat Daerah yang paling tinggi pencapaiannya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai 78,14% disusul Satuan Polisi Pamong Praja 76,34% dan Dinas Lingkungan Hidup 75%. “Yang paling rendah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), karena disanalah yang paling besar belanja modal. Menurutnya Organisasi Perangkat Daerah yang belanja modalnya banyak, memang biasanya maksimal di Triwulan IV. Mukhlis menjelaskan, mengapa PUPR belum maksimal karena rata-rata pekerjaan konstruksi sehingga butuh waktu lelang, dan hampir semua Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki belanja modal pada umumnya di Triwulan III dan IV baru bisa maksimal ([SRIPOKU.COM](http://SRIPOKU.COM)).

Gubernur Sumsel Alex Noerdin, memberikan penjelasan belum tercapainya target realisasi belanja daerah Sumatera Selatan selama lima tahun terakhir kepemimpinannya. Menurut Alex Noerdin capaian realisasi anggaran yang selalu berada diatas 90 persen saat ini merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Penyebab belum tercapainya target realisasi pendapatan tersebut lantaran nilai lelang yang terkadang berada dibawah rencana anggaran. “kalau capaiannya masih diangka 94-95 persen itu bagus. Sebab, kalau ada nawar dengan lelang , kan jadi tidak pas dengan (rencana) lelangnya. Sementara, kalau ada yang rendah, kan harus diterima. Sehingga menjadi lebih (anggarnya)”. Kegagalan pemerintah untuk mencapai target belanja tersebut patut dipertanyakan. Apakah hal tersebut terkait dengan faktor eksternal atau karena kurang matangnya perencanaan yang disusun oleh pemerintah (TribunSumsel.com).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama para anggota DPRD menggelar rapat paripurna. Salah satu pembahasannya yakni terkait rendahnya Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2019. Anies dikritik terkait rendahnya realisasi anggaran Pemprov DKI hingga akhir November 2018 oleh anggota DPRD Fraksi PKB, Abdul Aziz. Ia mencatat rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 disebabkan terjadinya gagal lelang dan kualifikasi syarat lelang yang tidak bisa dipenuhi oleh peserta. Ia berharap Anies melakukan audit serta monitoring dan evaluasi (monev) kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit

kerja perangkat daerah (UKPD) terkait kinerjanya selama ini (WartakotaLive.com).

Jelang akhir tahun, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota Makassar tahun anggaran 2018 belum terealisasi maksimal. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Naisyah T. Azikin mengungkapkan, salah satu kendala menyebabkan kurang maksimalnya realisasi anggaran, yaitu karena adanya proyek yang mengalami gagal lelang. “Untuk proyek yang gagal lelang dan sudah tidak bisa dikerjakan sama sekali, dananya tentu secara otomatis akan menjadi Silpa”. Kendati demikian, Naisyah mengaku tetap optimis, anggaran tersebut masih dapat terealisasi dengan baik. Sebab, mayoritas program pembangunan Pemkot Makassar dijadwalkan rampung bulan ini (Rakyatku.com).

Proyek pembangunan didaerah sepertinya belum berjalan maksimal. Buktinya realisasi anggaran, baik APBD maupun APBN, masih sangat rendah per semester 1, 2017. Padahal jika optimal bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Kantor wilayah Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan mencatat realisasi APBD di Sumsel belum separuh, ini bahkan lebih rendah dari periode sama tahun lalu. Penyebabnya klasik sama seperti tahun-tahun sebelumnya, karena keterlambatan pengajuan anggaran dari batas waktu yang ada khususnya untuk belanja fisik. Mura Syahrizal menjelaskan per Juli 2017 realisasi APBD baru sekitar 40 persen, dia tak menampik ada keterlambatan terutama di awal-awal tahun dalam belanja fisik. Seperti kendala proses lelang, ketidakpastian anggaran, dan masalah teknis

lainnya. “ini banyak terjadi di triwulan I dan II anggaran. Meski begitu kami biasanya mulai mengejar realisasi di triwulan III dan IV seperti tahun sebelumnya,” ujarnya (sumeks.co.id).

Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ruwaida, dkk (2015), Agung, dkk (2013), Imanuel dan Sherly (2015) yang menyatakan bahwa faktor internal dan faktor eksternal tidak terealisasinya anggaran belanja, diketahui faktor internal seperti perencanaan yang belum matang, administrasi yang belum terlaksana dengan baik sangat mempengaruhi untuk terealisasinya anggaran, karena administrasi yang telah terencana dengan benar akan menghasilkan anggaran yang sesuai target sasaran. Faktor eksternalnya seperti Sumber Daya Manusia yang tidak memiliki kompetensi yang memadai menduduki jabatan penting, sehingga seringkali lalai dengan tanggungjawab terhadap realisasi anggaran.

Berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bahwa Dinas Perhubungan melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan asset daerah, maka dari itu Dinas Perhubungan Kota Palembang secara pasti menggunakan Anggaran Belanja untuk pengeluaran Belanja Modal maupun Belanja Operasional. Dalam menjalankan program anggaran belanja dari tahun 2015 sampai 2017 Kota Palembang masih mengalami penurunan. Adapun realisasi anggaran belanja pada Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2015 sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut :



**Tabel I.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada**  
**Dinas Perhubungan Kota Palembang**  
**(Penyerapan Anggaran)**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	Rp. 46.087.364.500,00	Rp. 41.552.105.374,00	90,16
2016	Rp. 34.705.577.418,87	Rp. 30.835.813.880,00	88,85
2017	Rp. 35.428.076.004,64	Rp. 31.673.365.145,00	89,40
2018	Rp. 40.060.134.405,15	Rp. 32.968.507.511,00	82,30

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perhubungan kota Palembang, bahwa realisasi anggaran belanja dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Laporan anggaran belanja pada Dinas Perhubungan Kota Palembang yang sudah direncanakan, tetapi tidak terealisasi sepenuhnya. Fenomena realisasi anggaran setiap tahunnya menjadi masalah rutin. Realisasi dana tidak efektif tercermin dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). SILPA menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif, karena di dalamnya masih ada program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan sedikit yang terlaksana pada tahun anggaran yang bersangkutan. Tidak terealisasinya anggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab diantaranya lemahnya perencanaan yang sering memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai, perencanaan anggaran yang kurang tepat akan menyulitkan dalam hal pembahasan anggaran, pelaksanaan anggaran tidak dipahami dengan baik. Semua itu dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat pentingnya analisis terhadap laporan keuangan sebagai alat informasi dalam menilai kondisi keuangan yang telah diuraikan serta beberapa faktor yang menyebabkan terealisasinya anggaran suatu lembaga, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kota Palembang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja pada Dinas Perhubungan Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

### **1. Bagi Penulis**

Sebagai masukan Penelitian ini dapat membantu menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis terutama dalam hal Anggaran Belanja mengenai Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Daerah.

## 2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi manajemen keuangan dinas perhubungan kota Palembang dalam mengatasi masalah rendahnya penyerapan anggaran belanja daerahnya.

## 3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis di masa yang akan datang, khususnya penelitian yang memiliki topik relatif sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Abdul Halim. 2017. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Agung Ayu. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Vol 1 No.2. akses 2 Desember 2018.  
<https://www.neliti.com/publications/28611/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-realisis-anggaran-pendapatan-dan-belanja>.
- Albert Kurniawan. 2014. *Metode Bisnis untuk Ekonomi & Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Baldric Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Deddy Ismatullah. 2013. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Cetakan ke-1. Bandung: Pustaka Setia.
- Haw Widjaja. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Edisi Kedua. Bandung: Alfabeta.
- [http://sumeks.co.id/realisasi-anggaran-tak maksimal/](http://sumeks.co.id/realisasi-anggaran-tak-maksimal/), 16 Agustus 2017, sumeks.co.id
- <http://sumsel.tribunnews.com/amp/2018/09/13/realisasi-belanja-568-satuan-kerja-di-sumsel-rp-677-triliun-dari-pagu-rp-1403triliun>, 13 september 2018, TribunSumsel.com
- <http://palembang.sripoku.com/amp/2018/10/24/hingga-oktober-realisis-apbd-sumsel-2018-baru-mencapai-5348>, 24 Oktober 2018, SRIPOKU.COM
- <http://sumsel.tribunnews.com/amp/2018/11/12/penjelasan-realisis-belanja-daerah-tak-pernah-capai-target-pada-5-tahun-terakhir>, 12 November 2018, TribunSumsel.com
- <http://wartakota.tribunnews.com/2018/11/29/anies-baswedan-dikritik-karena-penyerapan-anggaran-yang-rendah>, 29 November 2018, WartakotaLive.com
- <http://news.rakyatku.com/read/132312/2018/12/21/realisasi-apbd-makassar-2018-belum-maksimal>, 21 Desember 2018, Rakyatku.com

<http://www.koranmadura.com/2019/01/18-paket-proyek-apbd-gagal-terrealisasi-komisi-iii-dprd-pemekasan-tuding-pemkab-lelet/>. 7 Februari 2019, koranmadura.com

Imanuel Pangkey. 2015. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Akuntansi*. Vol 3 No.4. akses 13 Desember 2018.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10581>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang standar akuntansi pemerintahan laporan realisasi anggaran.

Priyatno Harsasto. 2017. *Ekonomi Pemerintahan*. Edisi 1. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ruwaida. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan. *Jurnal Akuntansi*. Vol 4 No.4. akses 5 Desember 2018.  
[www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4493/3869](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4493/3869).

Tumpal Manik. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Vol 6 No.2. akses 10 Desember 2018.  
<https://www.researchgate.net/publication/324816522>.

V Wiratna Sujarweni. 2015. *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress.

Windhu Putra. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama.

Ahmad Erani Yustika. 2014. *Perekonomian Indonesia (Catatan dari Luar Pagar)*. Malang: Bayumedia Publishing.